



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2017**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2018**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2017 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2018
Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional,

Johar Arifin, S.IP, MPM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKj Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2017 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2017 dengan mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja terhadap pencapaian 1 (satu) target sasaran strategis dengan menggunakan instrumen 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU).

Kinerja Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Hubungan Internasional tahun 2017 dalam mencapai target sasaran strategis '*Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*' berhasil mencapai nilai rata-rata sebesar 100% (sangat baik).

Capaian sasaran strategis tersebut diukur menggunakan indikator-indikator yang memperoleh nilai realisasi sebagai berikut:

- a. IKU '*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*' berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik).
- b. IKU '*Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*' berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik).
- c. IKU '*Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*' berhasil mencapai nilai 100% (sangat baik).

Dari segi **output kegiatan**, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 560 (lima ratus enam puluh) dokumen rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) dokumen rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 94 (sembilan puluh empat) rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

peraturan perundang-undangan, dan 94 (sembilan puluh empat) rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pencapaian target sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan '*Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*' yang memperoleh dukungan anggaran melalui pagu revisi sebesar Rp. 1.012.556.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.000.462.103 atau capaian senilai 98,80%.

Keberhasilan kinerja tahun 2017 juga ditunjang komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran staf dalam menyelesaikan setiap target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholders* di kementerian dan lembaga, baik di dalam dan luar negeri, secara berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ...	1
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	8
B. Penetapan Kinerja	8
C. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III CAPAIAN KINERJA	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Capaian Kinerja Tahun 2017	12
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017	13
D. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis antara Tahun 2016 dan Tahun 2017	29
E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	30
F. Realisasi Anggaran Tahun 2017	32
BAB IV PENUTUP	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2017.

Laporan ini disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2017. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian 1 (satu) target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU), sebagaimana mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet,

rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) Subbidang, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Hubungan Bilateral, terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni: Hubungan Bilateral Asia Pasifik, Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa, dan Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah.

2. Bidang Hubungan Regional, terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni: Hubungan Regional Asia Pasifik, Hubungan Regional Amerika dan Eropa, dan Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah.
3. Bidang Hubungan Multilateral terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni: Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa Bangsa, Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Hubungan Internasional Khusus.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Asdep Bidang Hubungan Internasional tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 44-48.

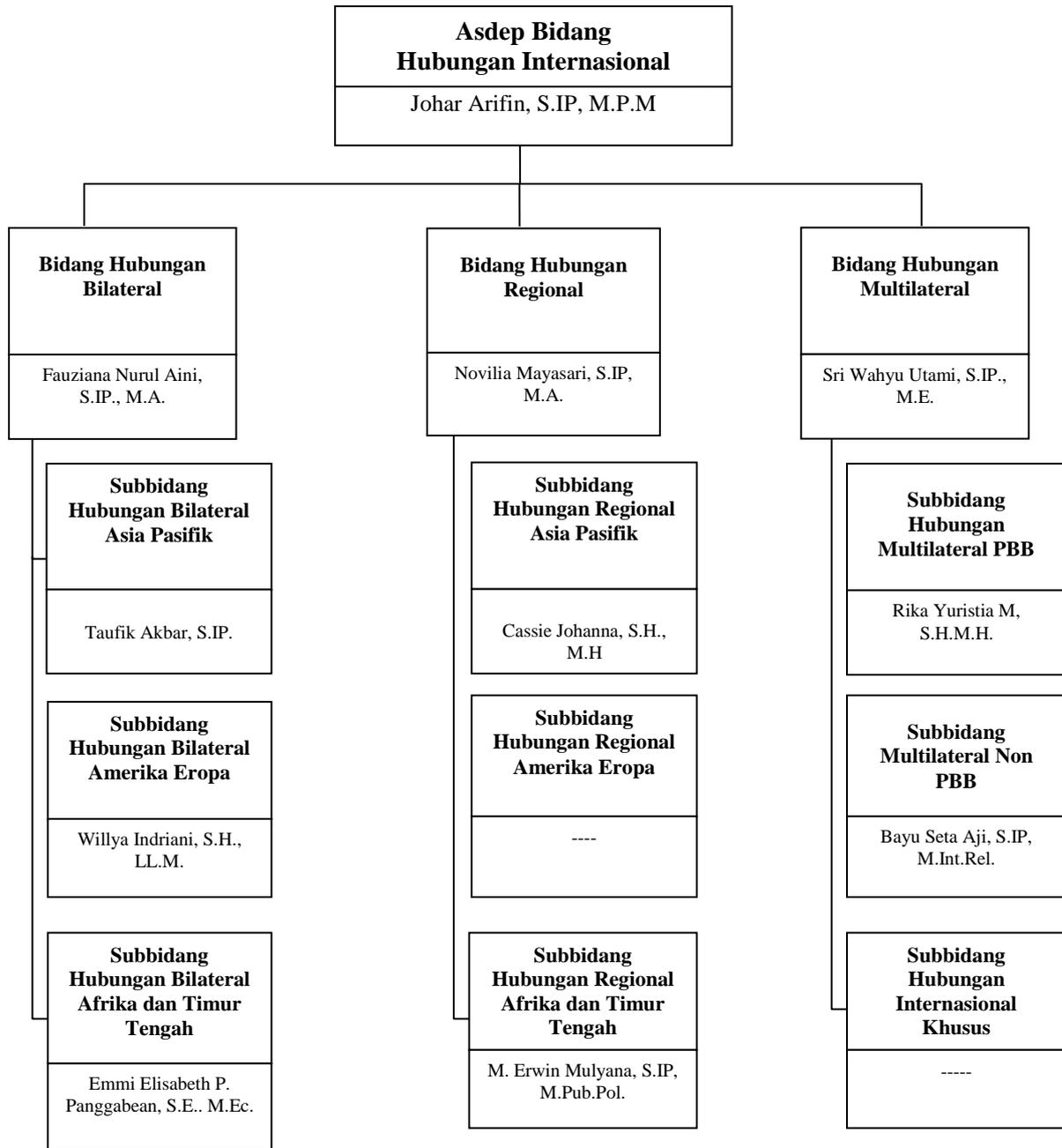
Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Asdep Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 14 (empat belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/c	1	Asdep (Es. II/a)	1	S 2	1	L	1
IV/b	1	Kabid (Es. III/a)	1	S 2	1	P	1
IV/a	1			S 2	1	P	1
III/d	1			S 2	1	P	1
III/c	7	Kasubid (Es. IV/a)	7	S 2	6	L	2
				S 1	1	P	4
III/a	4	Analisis Kebijakan	4	S 2	1	L	1
				S 1	3	P	3

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Struktur Organisasi Asdep Bidang Hubungan Internasional



C. Gambaran Aspek Strategis Asdep Bidang Hubungan Internasional

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi yang bertugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek strategis bagi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas dimaksud.

Dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet, Asdep Bidang Hubungan Internasional berperan membantu Deputi Bidang Polhukam untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi dari Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Lebih lanjut, Asdep Bidang Hubungan Internasional ikut terlibat aktif dalam proses pengelolaan kabinet, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang hubungan internasional.

Dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet, Asdep Bidang Hubungan Internasional menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Secara internal, Asdep Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) kekuatan organisasi, yang terdiri dari komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal, belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, dan disiplin serta motivasi/etos kerja yang belum maksimal, dan (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Secara eksternal, Asdep Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta
 - (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi maupun di lingkungan kepresidenan..

Selain itu, Asdep Bidang Hubungan Internasional juga masih memiliki permasalahan-permasalahan yang dapat berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan tugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet, antara lain:

1. Aspek Ketatalaksanaan: Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar kementerian/lembaga di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan maupun unit internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.
2. Aspek Sumber Daya Manusia: Kualitas kemampuan (*skill*) sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.
3. Aspek Sarana dan Prasarana: Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asdep Bidang Hubungan Internasional memandang perlunya langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM dan Tata Laksana atau instansi terkait lainnya dan pihak donor di luar negeri.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan *e-governance*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional disusun dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2017, Asdep Bidang Hubungan Internasional merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran strategis, yaitu: *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional”*. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Bidang Hubungan Internasional, yaitu menghasilkan *output* dan *outcome* berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional.

Strategi pencapaian sasaran strategis tersebut diselenggarakan melalui pelaksanaan 1 (satu) program, yaitu *“Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”* dan 1 (satu) kegiatan, yaitu *“Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional”*.

Tabel 2.1.
Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sepanjang tahun. Asdep Bidang Hubungan Internasional menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan rumusan sasaran program/kegiatan: *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang*

berkualitas di bidang Hubungan Internasional”, yang akan diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang target capaiannya ditetapkan sebesar 100%, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut

**Tabel 2.2.
Penetapan Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%

Sebagai catatan, satuan untuk mengukur kinerja tersebut ditetapkan dengan persentase (%) dengan alasan bahwa prakarsa kegiatan perumusan rancangan rekomendasi sebagian besar berasal dari kementerian/lembaga serta penugasan langsung dari Sekretariat Kabinet sesuai dengan dinamika yang terjadi pada saat itu, dimana hal tersebut tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas/dokumen.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan “*Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional*” dalam mencapai target kinerja didukung oleh Pagu Anggaran Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017 yang ditetapkan senilai Rp. 1.093.000.000. Pada pertengahan tahun, Pagu Anggaran tersebut direvisi menjadi senilai Rp 1.012.556.000 mengingat adanya anggaran per kegiatan yang dialokasikan (diblokir) sebagai tambahan pada anggaran APBN-P Tahun 2017 sejumlah Rp. 80.444.000. Adapun rincian anggaran dimaksud terbagi pada 3 (tiga) kegiatan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Pagu Anggaran Awal dan Pagu Anggaran Revisi Tahun 2017

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Revisi
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp 533.957.000.	Rp 566.506.000.
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional	Rp 93.140.000.	Rp 145.407.000.
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	Rp 465.903.000.	Rp 300.643.000.
	JUMLAH	Rp 1.093.000,000.	Rp 1.012.556.000.
	Alokasi tambahan anggaran APBN-P TA 2016 (Blokir)	-	Rp 80.444.000.

C. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Capaian sasaran strategis Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017 akan diukur menggunakan instrumen 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana tercantum dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017 dan dokumen Penetapan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017.

IKU tersebut digunakan untuk mengukur kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional, yaitu yang terkait dengan: (a) rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, (b) persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan (c) materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rumusan 'disetujui' pada IKU tersebut memiliki arti bahwa Deputi Bidang Polhukam memberikan persetujuan atau respon atas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Hubungan Internasional yang diajukan oleh Asdep Bidang Hubungan Internasional dengan mengajukannya kepada Sekretaris Kabinet.

Lebih lanjut, pengukuran realisasi kinerja pada masing-masing IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	<p>Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh <u>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</u> X 100%</p> <p>Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p>
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	<p>Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh <u>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</u> X 100%</p> <p>Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p>
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	<p>Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh <u>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</u> X 100%</p> <p>Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p>

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja serta bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.

Pengukuran kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana tersebut pada Tabel 6.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - <85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

B. Capaian Kinerja Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, capaian kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional dalam mencapai sasaran strategis "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*" berhasil memperoleh nilai-rata-rata 100% atau tergolong dalam kategori sangat baik. Hal tersebut diukur melalui capaian target kinerja untuk masing-masing IKU yang memperoleh nilai rata-rata 100% (sangat baik).

Sementara itu, realisasi *output* berupa rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) rancangan rekomendasi kebijakan, dengan rincian: (a) 372 rancangan rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, (b) 94 rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan (c) 94 rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2017

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Output	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	372 rancangan	100%	100%	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	94 rancangan	100%	100%	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	94 rancangan	100%	100%	100%

C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, capaian kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2017 mencerminkan keberhasilan Asdep Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan

Internasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian 570 (lima ratus tujuh puluh) rancangan rekomendasi kebijakan memiliki implikasi terhadap percepatan dan penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan internasional. Rancangan rekomendasi tersebut dihasilkan dari pemilahan surat masuk yang berjumlah 1.700 surat.

Pengukuran capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 1

“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan’, dengan target ditetapkan 100% berhasil mencapai realisasi 100% maka capaian sebesar 100% (sangat baik).

Capaian IKU 1 ini diukur menggunakan formulasi perhitungan dengan memperbandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Sepanjang tahun 2017, Asdep Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 370 (tiga ratus tujuh puluh) rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam. Seluruh dokumen memperoleh persetujuan Deputi Bidang Polhukam, sehingga capaian kinerja untuk IKU 1 mencapai 100% (kategori sangat baik).

**Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2017**

IKU	Realisasi Output		Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	372 rancangan	100%	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	372 rancangan			

Sumber daya dalam rangka pencapaian target IKU 1 terdiri dari 14 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat masuk serta alokasi anggaran sebesar Rp Rp 566.506.000. Sementara itu, rancangan rekomendasi pada IKU 1 ini terkait dengan laporan kunjungan kerja Menteri ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan baik berasal dari lembaga internasional /Kementerian/Lembaga dalam lingkup hubungan internasional, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam lingkup hubungan internasional, dan Laporan tim advance terkait persiapan pelaksanaan dan pendahuluan suatu forum internasional yang akan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam penyusunan rekomendasi tersebut, Asdep Bidang Hubungan Internasional melakukan berbagai kegiatan pendalaman substansi yang mengacu pada: (i) beberapa referensi, seperti buku, jurnal, media cetak dan internet, (ii) rapat koordinasi dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri, (iii) pemantauan/kunjungan kerja dan berpartisipasi pada penyelenggaraan konferensi/seminar/FGD/ /diskusi terbatas di dalam dan luar negeri.

Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

a. Menghadiri pertemuan atau rakor di dalam negeri, antara lain mengenai:

- Peran Aktif Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB menuju Visi 4000 *Peacekeepers* pada tahun 2015-2019 dan Rencana Peningkatan Peran Perempuan dalam Misi Perdamaian.
- Rencana Pembentukan *Single Agency* KSST (Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular) Indonesia.
- Monitoring dan evaluasi atas implementasi kerja sama Pemerintah Indonesia-PBB melalui *Indonesia-UN Consultative Forum*.
- Evaluasi Tim Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemri pada Organisasi Internasional.
- Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Forum of East Asia–Latin America Cooperation* (FEALAC) dan Rencana Pembukaan *Regional Office International Network for Bamboo and Rattan* (INBAR).
- Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama *Vocational Training* antara RI dan Jerman.

- Penyusunan Kertas Posisi dan Buku Pedoman Delegasi RI pada Sidang Umum UNESCO ke-39.

b. Melakukan pemantauan atas arahan Presiden RI, antara lain mengenai:

- **Impementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**, dilaksanakan di empat daerah, yaitu Yogyakarta, Jawa Barat (Bogor dan Bandung), Kalimantan Barat (Pontianak), dan Jawa Timur (Surabaya), yang bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta memperoleh informasi mengenai rencana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan hasil implementasi MDGs di daerah-daerah tersebut.



- **Rencana Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa mengenai Perlindungan Indikasi Geografis (IG)**, dilaksanakan di tiga daerah yaitu Takengon (Aceh Tengah), Temanggung (Jawa Tengah), dan Kintamani (Bali). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden khususnya mengenai upaya peningkatan ekspor dan perlindungan terhadap UMKM. Pemantauan juga diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pasar sebelum dan setelah produk-produk tersebut di terdaftar sebagai Indikasi Geografis dan melihat sisi hambatan prosedur pendaftaran sebagai implementasi dari peraturan perundangan terkait Indikasi Geografis.



- **Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama *Sister City/Sister Province***, dilaksanakan di lima daerah yaitu Bali, Yogyakarta, Bandung, Pontianak, dan Surabaya. Kegiatan bertujuan untuk memperoleh informasi dan melakukan kajian terhadap pelaksanaan kerja sama yang sedang disusun maupun yang telah ditandatangani antara pemerintah daerah dan pihak-pihak di luar negeri.

c. Menghadiri pertemuan/konferensi di luar negeri, antara lain mengenai:

- **Pertemuan *The Fifth Session of the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES-5)***, di Bonn, Jerman, dilaksanakan pada tanggal 7-10 Maret 2017, di Bonn, Jerman, yang bertujuan untuk membahas agenda terkait kemajuan implementasi program kerja IPBES periode 2014-2018 serta membahas

program kerja mengenai pengembangan kapasitas, *indigenous and local knowledge systems*, *thematic assessment on invasive alien species*, dan *thematic assessment on the sustainable use of biodiversity*.



- **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2017**, dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juli 2017 di Hamburg, Jerman. G20 merupakan forum yang memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. G20 memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara maju dan menawarkan berbagai peluang dalam meningkatkan investasi dan perdagangan. Namun demikian, terdapat tantangan bagi Indonesia dalam mengikuti dan mengimplementasikan agenda G20 yang membutuhkan komitmen internal agar tetap berada pada jalur kebijakan G20.



- **Pertemuan IMO (Internasional Maritime Organization)**, dilaksanakan pada tanggal 24-28 Juli 2017 di London, Inggris, untuk membahas dan meninjau kembali kinerja IMO serta usulan anggaran untuk tahun 2018-2019.



- **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-30**, dilaksanakan pada tanggal 26-29 April 2017 di Manila, Filipina. Konferensi berhasil menyepakati *ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025*, yang intinya mengamanatkan penguatan fungsi aparatur sipil diantara negara anggota ASEAN dalam mendorong kerja sama lintas sektor dan lintas pilar untuk mendorong integrasi regional dan mewujudkan ASEAN Vision 2025.



- **Pertemuan ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Joint Committee**, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-3 Juni 2017 di Auckland, New Zealand, yang membahas isu tentang implementasi

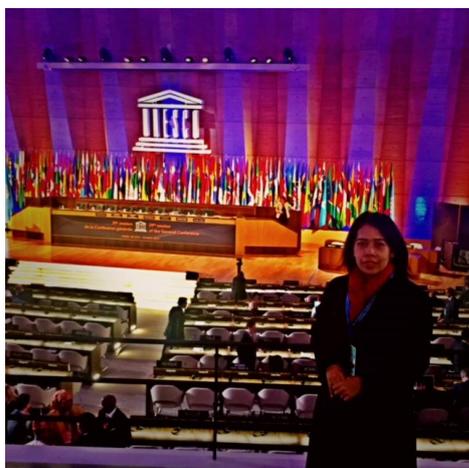
AANZFTA *Agreement* di seluruh bidang perjanjian khususnya perdagangan barang, jasa, investasi dan kerja sama ekonomi serta *General Review of the AANZFTA Agreement*. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan oleh pertemuan tersebut kepada Delegasi Indonesia adalah penyelesaian ratifikasi *The 1st Protocol to Amend AANZFTA*.



- ***Temasek Foundation International-Leaders in Economic Development Programme (TFILED) ke-4***, dilaksanakan tanggal 20-28 Maret 2017 di Singapura, yang bertujuan untuk membahas strategi ekonomi pembangunan yang diadopsi di Singapura dan beberapa negara di Asia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Asia. Metode pelatihan program TFILED ke-4 dilakukan dengan diskusi di kelas, studi kasus, dialog dengan tokoh-tokoh ekonomi di Singapura, dan kunjungan lapangan ke beberapa institusi.



- **The 39th Session of the UNESCO General Conference**, dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober-14 November 2017, di Paris, Prancis yang bertujuan untuk membahas upaya dan solusi dalam rangka implementasi Agenda 2030 terkait *Sustainable Development Goals-SDGs*, yaitu: *quality education* (SDG 4), *gender equality* (SDG 5), *decent work and economic growth* (SDG 8), *industry, innovation and infrastructure* (SDG 9), *sustainable cities and communities* (SDG 11), *responsible consumption and production* (SDG 12), *climate action* (SDG 13), dan *partnership for the Goals* (SDG 17).



- **The 6th Annual UN Forum on Business and Human Rights (FBHR)**, dilaksanakan pada tanggal 27-29 November 2017 di Jenewa, Swiss. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi wadah bertukar pikiran bagi negara anggota untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Indonesia mengangkat isu yang terkait dengan hak asasi para nelayan Indonesia dan keterkaitannya dengan *Illegal Fishing*.



- **Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) Tahun 2017***, dilaksanakan pada tanggal 6-11 November 2017 di Da Nang, Vietnam. Secara umum KTT membahas mengenai perekonomian yang berkesinambungan, inovatif dan inklusif, integrasi ekonomi regional, penguatan daya saing UMKM, serta terkait isu-isu perubahan iklim, pertanian dan digital.



Indikator Kinerja Utama 2

‘Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan’, dengan target ditetapkan 100% berhasil mencapai realisasi 100% maka capaian sebesar 100% (sangat baik).

Capaian IKU 2 ini diukur menggunakan formulasi perhitungan dengan memperbandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Sepanjang tahun 2017, Asdep Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 94 (sembilan puluh empat) rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan

izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hubungan Internasional untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam. Seluruh dokumen memperoleh persetujuan Deputi Bidang Polhukam, sehingga capaian kinerja untuk IKU 2 mencapai 100% (kategori sangat baik).

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2017

IKU	Realisasi Output		Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	94 rancangan	100%	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	94 rancangan			

Sumber daya dalam rangka pencapaian target indikator ini terdiri dari 14 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat masuk, serta alokasi anggaran sebesar Rp 145.407.000. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asdep Bidang Hubungan Internasional terlibat dalam berbagai kegiatan serta berpartisipasi aktif dalam keanggotaan tim untuk proses ratifikasi dan pembahasan beberapa perjanjian internasional, antara lain mengenai:

- Ratifikasi Konvensi *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995*.
- Penyusunan *draft Arrangement Kerja Sama RI-IOM (International Organization for Migration)*.
- Ratifikasi Akta-akta Akhir *UPU (Universal Postal Union)* Hasil Kongres ke-26 di Istanbul.
- Revisi Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Penyusunan *Host Country Agreement (HCA) RI-UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)*.

- Revisi Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional.
- Pengesahan Indonesia sebagai *Associate Member* di *Melanesian Spearhead Group (MSG)*.
- Amandemen *Host Country Agreement (HCA)* antara Pemerintah RI dan *Economic Research Institute ASEAN and East Asia (ERIA)*.
- Penyusunan *Host Country Agreement (HCA)* antara Pemerintah Indonesia dengan *Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.
- Ratifikasi *Final Acts of World Radiocommunication Conference 2015*.
- Ratifikasi *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Points in Contracting Parties* dan *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services*.
- Ratifikasi *Protocol 7 Customs Transit System*.
- Penetapan Dasar Hukum Keanggotaan Indonesia pada *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACCC)*.
- Amandemen Perjanjian *ASEAN Plus Three Emergency Rise Reserve (APTERR)*.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Ratifikasi Persetujuan Dasar antara Pemerintah RI dan Pemerintah Papua Nugini (PNG) tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan.

Indikator Kinerja Utama 3

“Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, dengan target ditetapkan 100% berhasil mencapai realisasi 100% maka capaian sebesar 100% (sangat baik).

Capaian IKU 3 ini diukur menggunakan formulasi perhitungan dengan memperbandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Sepanjang tahun 2017, Asdep Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 94 (sembilan puluh empat) rancangan rekomendasi persetujuan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam. Seluruh dokumen memperoleh persetujuan Deputi Bidang Polhukam, sehingga capaian kinerja untuk IKU 3 mencapai 100% (kategori sangat baik).

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2017

IKU	Realisasi Output		Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	94 rancangan	100%	100%	100%
	Jumlah terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	94 rancangan			

Sumberdaya dalam rangka pencapaian target indikator ini terdiri dari 14 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat masuk, serta alokasi anggaran sebesar Rp 300.643.000. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asdep Bidang Hubungan Internasional terlibat dalam berbagai kegiatan serta berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan materi substansi bagi Presiden

atau Sekretaris Kabinet dalam menerima tamu kenegaraan atau duta besar negara sahabat, antara lain:

a. Materi substansi bagi Presiden RI dalam rangka:

- Menerima kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Jepang, Y.M. Shinzo Abe ke Indonesia pada tanggal 15-16 Januari 2017 di Jakarta.
- Melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, Y.M. Dato Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak pada tanggal 31 Januari 2017 di Jakarta.
- Persiapan kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Australia pada tanggal 26-27 Februari 2017.
- Menerima kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi pada tanggal 1 Maret 2017 di Jakarta.
- Persiapan kehadiran Presiden RI pada Rangkaian *Leaders Summit in Commemoration of the 20th Anniversary of the Indian Ocean Rim Association* di Jakarta
- Menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Y.M. Francois Hollande pada tanggal 29 Maret 2017 di Jakarta
- Menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afganistan pada tanggal 5 April 2017 di Jakarta.
- Menerima kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Y.M. Michael Richard Pence, pada tanggal 20 April 2017 di Jakarta.
- Melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina dan Hong Kong pada tanggal 28 April 2017 s.d 1 Mei 2017.
- Penyiapan bahan substansi Rapat Terbatas tentang rencana kunjungan Presiden RI ke RRT untuk menghadiri pertemuan *Belt and Road Forum for International Cooperation* pada tanggal 14-15 Mei 2017 di Beijing, RRT.
- Melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Lithuania, Y.M. Dalia Grybauskaite, tanggal 17 Mei 2017 di Jakarta.

- Penyiapan sambutan Presiden RI pada acara perayaan 50 tahun ASEAN, pada tanggal 11 Agustus 2017 di Jakarta.
- Melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Y.M. Joseph R. Donovan, pada tanggal 15 Agustus 2017 di Jakarta.
- Menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Republik Uzbekistan, Y.M. Zoyir Toirovich Mirzaev, pada tanggal 21 Agustus 2017 di Jakarta.
- Penyiapan bahan substansi Presiden RI dalam rangka *Leaders Retreat* di Singapura, tanggal 7 September 2017.
- Menerima kunjungan kehormatan Direktur Jenderal *World Intellectual Property Organization* (WIPO), pada tanggal 19 September 2017 di Jakarta.
- Penyiapan bahan substansi kunjungan Presiden RI ke Brunei Darussalam tanggal 6 Oktober 2017.
- Menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Demokratik Laos, Y.M. Thongloun Sisoulith, pada tanggal 12 Oktober 2017 di Jakarta.
- Menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar, pada tanggal 18 Oktober 2017 di Bogor.
- Menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Korea, Y.M. Moon Jae-In tanggal 9 November 2017 di Bogor.
- Penyiapan bahan substansi Presiden RI dalam menghadiri KTT APEC di Da Nang, Vietnam, tanggal 10-11 November 2017.
- Penyiapan bahan substansi Presiden RI dalam rangka Konsultasi Tahunan ke-12 RI-Malaysia, pada tanggal 22 November 2017 di Kuching, Malaysia.
- Menerima kunjungan kehormatan Ketua Dewan Tinggi Perdamaian (*High Peace Council/HPC*) Republik Islam Afghanistan, Y.M. Mohammad Karim Khalili, pada tanggal 24 November 2017 di Jakarta.

- Menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Denmark, Y.M. Lars Lokke Rasmussen, pada tanggal 28 November 2017 di Bogor.
- Melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Nauru, Y.M. Baron Divavesi Waqa, pada tanggal 8 Desember 2017 di Jakarta.
- Melakukan pertemuan bilateral Presiden RI dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Presiden Republik Islam Afganistan, dan Presiden Palestina di sela-sela KTT Luar Biasa OKI, pada tanggal 13 Desember 2017 di Istanbul, Turki.

b. Materi substansi bagi Sekretaris Kabinet dalam rangka:

- Menerima audiensi *Acting* Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia, Y.M. Salvador Rueda Rabanal pada tanggal 3 Februari 2017 di Jakarta.
- Menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Y.M. Joseph R. Donovan Jr. pada tanggal 7 Februari 2017 di Jakarta
- Menerima *courtesy call* Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia pada tanggal 20 Februari 2017 di Jakarta
- Menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Y.M. Volodymyr Pakhil, pada tanggal 3 Maret 2017 di Jakarta.
- Menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Y.M. Peter Macarthur pada bulan Maret 2017 di Jakarta.
- Menerima kunjungan kehormatan Kuasa Usaha Sementara (*Charge D Affairs*) Kedutaan Besar Polandia di Jakarta, Y.M. Igor Kaczmarczyk, tanggal 26 Mei 2017 di Jakarta.
- Menerima audiensi Duta Besar Viet Nam untuk Indonesia, pada tanggal 4 Juli 2017 di Jakarta.
- Menerima audiensi Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Y.M. Patrick Hermann, pada tanggal 13 Juli 2017 di Jakarta.

- Menerima audiensi Ketua Lembaga Riset Kebijakan *Liberal Democratic Party* (LDP) Jepang, Mr. Toshimitsu Motegi, pada tanggal 27 Juli 2017 di Jakarta.
- Menerima *courtesy call* Duta Besar Selandia Baru untuk Republik Indonesia, pada tanggal 29 September 2017 di Jakarta.
- Menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Y.M. Peter Macarthur, pada tanggal 17 Oktober 2017 di Jakarta.

D. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis antara Tahun 2016 dan Tahun 2017

Apabila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Asdep Bidang Hubungan Internasional berhasil mempertahankan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja dengan nilai rata-rata 100% (sangat baik). Namun, capaian *output* pada tahun 2016 tercatat lebih banyak dibandingkan capaian tahun 2017, yaitu 612 (enam ratus dua belas) dokumen rekomendasi. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama antara tahun 2016 dan tahun 2017 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja
antara Tahun 2016 dan Tahun 2017

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%	100% 378 rancangan	100%	100%	100% 372 rancangan	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi	100%	100% 101 rancangan	100%	100%	100% 94 rancangan	100%

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.						
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%	100% 133 rancangan	100%	100%	100% 94 rancangan	100%
	TOTAL	100%	100% 612 rancangan	100%	100%	100% 570 rancangan	100%

E. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan, Asdep Bidang Hubungan Internasional memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
- b. Munculnya isu-isu penting di bidang hubungan internasional yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.

- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.

Pencapaian kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2017 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Pengaruh dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga memperngaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam menjalin *networking* melalui keikutsertaan dalam tim interdep dan berperan serta dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga.

F. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Capaian kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional tahun 2017 didukung oleh pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp 1.012.556.000 (terdapat pengurangan senilai Rp. 80.444.000. dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 1.093.000.000). Asdep Bidang Hubungan Internasional berhasil **merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.000.462.103 yang merupakan capaian senilai 98,80% dan dikategorikan sangat baik.**

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2017

No	Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian
	(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp 566.506.000	Rp 557.422.461	98,39%
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional	Rp 145.407.000	Rp 142.397.935	97,93%
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	Rp 300.643.000	Rp 300.641.707	100%
	Capaian Pagu Revisi	Rp 1.012.556.000	Rp 1.000.462.103	98,80%
	Blokir Anggaran	Rp 80.444.000		
	Pagu Awal	Rp 1.093.000.000		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asdep Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2017. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Hubungan Internasional tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

Perencanaan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, serta diukur dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" tersebut mencapai nilai rata-rata 100% (kategori sangat baik). Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja "*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*", "*Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*", dan "*Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" memperoleh nilai 100% (kategori sangat baik).

Sepanjang tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 560 (lima ratus enam puluh) dokumen rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) dokumen rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 94 (sembilan puluh empat) rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, dan 94 (sembilan puluh empat) rancangan rekomendasi

terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2017 mencapai Rp 1.000.462.103 yang merupakan capaian senilai 98,80% (kategori sangat baik)

Sepanjang tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerjanya untuk memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja, serta telah menyerap anggaran yang cukup memuaskan. Agar keberhasilan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan perlu berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan Tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asdep Bidang Hubungan Internasional serta dapat menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.